

ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI REGIONAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PERKOTAAN

(Studi Kasus 44 Kota di Indonesia Tahun 2007-2010)

Dody Nursetyo Yekti Hapsoro, Gunanto ¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional problem, it's involves various aspects of life, from the economic to the social. The spread of poor people in Indonesia focused on urban and rural areas. Urban poverty becomes an increasingly relevant issue to be addressed, related to the dynamics of urban development and population growth that accompanies. Trend of population urbanization in Indonesia was followed by further poverty urbanization, it's impact on the incidence of various aspects of the urban poverty problems and urban poverty have rigidity to decline, if compared to rural areas.

Regional economic stability have influential on poverty, some macroeconomic variables be indicator. Efforts to address poverty should refer to the development of these variables. The purpose of this study was to analyze a regional macroeconomic variable, in this case GRDP, unemployment, and inflation in urban areas during the period 2007-2010.

This study, uses secondary data in panel data form, consisting of time series data over the period 2007-2010 and a cross section 44 cities in Indonesia. The approach to estimate the panel data is Fixed Effect Model (FEM), by including a dummy variable in the equation, also known as the Least Square Dummy Variable (LSDV). Dummy variables regions used in this research model because of each difference in the characteristics and resources of each region.

The results showed that GRDP variables have significant negative effect on poverty. Meanwhile, unemployment and inflation variables have positive and significant impact on poverty. Thus, GRDP, unemployment, and inflation is worth a consideration in formulating policies to address the problem of urban poverty.

Keywords: *urban poverty, regional macroeconomic variables, unemployment, inflation.*

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks dan bersifat multidimensional, mendorong berbagai upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Muhammad Nasir, dkk, 2008). Badan Pusat Statistik (2010) menggunakan konsep kemampuan dan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), untuk mengukur kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan bukan

¹ Corresponding author

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk miskin dapat diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1999 hingga 2000 mengalami penurunan, dari angka 47,97 juta jiwa atau 23,43% dari total penduduk pada tahun 1999 menjadi 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33% dari total penduduk di tahun 2010. Angka kemiskinan yang besar pada tahun 1999 dikarenakan terjadinya krisis ekonomi 1997-1998. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, telah mengakibatkan terjadinya kontraksi perekonomian dan mendorong meningkatnya jumlah penduduk miskin (Lepi T.Tarmidi, 1999).

Kemiskinan perkotaan menjadi isu yang kian relevan dan mendesak untuk ditangani, terkait dengan dinamika pembangunan perkotaan di Indonesia. Sebagai ilustrasi, sepanjang 1999 hingga 2007 terus mengalami kenaikan populasi di 44 wilayah perkotaan, total pertumbuhan populasi di 44 perkotaan mencapai 2,31% pada tahun 2007 dan ini membuat jumlah penduduk perkotaan meningkat dari 91.879.774 jiwa pada tahun 1999 menjadi 102.544.507 jiwa pada tahun 2007. Dari data tersebut terlihat kecenderungan urbanisasi kependudukan di Indonesia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan yang lebih lanjut berdampak pada timbulnya berbagai aspek permasalahan kemiskinan perkotaan, seperti aspek fisik (berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi) dan aspek nonfisik seperti sosial-ekonomi (keterbatasan lapangan pekerjaan, kesenjangan, ketidakadilan), ataupun aspek ekologis (banjir dan pencemaran lingkungan) (Prio Sambhodo, dkk, 2011).

Tabel 1
Jumlah Populasi 44 Kota Aglomerasi di Indonesia dan Pertumbuhannya
Tahun 1999-2007

No.	Nama Kota	Jumlah Populasi				Pertumbuhan (%)		
		1999	2002	2005	2007	2002	2005	2007
1	Jakarta ²	24087455	23925397	25795949	26750001	-0.67	7.82	3.70
2	Surabaya	9690650	9851508	10364636	10501043	1.66	5.21	1.32
3	Bandung	6067916	6478492	6983461	7156927	6.77	7.79	2.48
4	Yogyakarta	6017350	6345099	6536464	6653353	5.45	3.02	1.79
5	Cirebon	5892488	6113864	6410264	6451311	3.76	4.85	0.64
6	Semarang	4713515	4878561	5016351	5049775	3.50	2.82	0.67
7	Medan	2254265	4216854	4432717	4634417	87.06	5.12	4.55
8	Kediri	3699737	3716133	3869799	3829444	0.44	4.14	-1.04
9	Pekalongan	2994265	3103484	3227247	3152589	3.65	3.99	-2.31
10	Mataram	2747941	2912095	2927341	3038078	5.97	0.52	3.78
11	Surakarta	2888353	2930166	3074990	2995529	1.45	4.94	-2.58
12	Makassar	2201438	2240979	2313244	2378334	1.80	3.22	2.81
13	Bandar Lampung	2641552	1927206	2032144	2153552	-27.04	5.45	5.97
14	Padang	1681048	1567594	1715324	1788924	-6.75	9.42	4.29
15	Tegal	1668301	1648116	1720655	1648185	-1.21	4.40	-4.21
16	Denpasar	1164113	1324885	1384640	1431525	13.81	4.51	3.39
17	Palembang	1426335	1512424	1338539	1396823	6.04	-11.50	4.35

² Jakarta merupakan wilayah aglomerasi dari beberapa kota administratif.

18	Tanjung Balai	418943	1148347	1177572	1211994	174.11	2.54	2.92
19	Payakumbuh	1090913	972931	1032143	1022116	-10.81	6.09	-0.97
20	Malang	813164	766867	780445	810651	-5.69	1.77	3.87
21	Madiun	805026	774668	804635	799756	-3.77	3.87	-0.61
22	Pekan Baru	597230	660229	707120	781126	10.55	7.10	10.47
23	Banjarmasin	558550	539060	574259	616018	-3.49	6.53	7.27
24	Manado	538456	536287	592131	596134	-0.40	10.41	0.68
25	Samarinda	602406	543713	576744	593827	-9.74	6.08	2.96
26	Pontianak	478136	482890	494384	513315	0.99	2.38	3.83
27	Balikpapan	442060	421177	434127	501150	-4.72	3.07	15.44
28	Jambi	435821	431709	460427	458226	-0.94	6.65	-0.48
29	Pare-Pare	348668	339289	344513	342625	-2.69	1.54	-0.55
30	Sukabumi	235163	261861	308595	311496	11.35	17.85	0.94
31	Palu	256914	275186	287576	303547	7.11	4.50	5.55
32	Kupang	228386	254053	268828	284895	11.24	5.82	5.98
33	Bengkulu	313190	304188	275418	268276	-2.87	-9.46	-2.59
34	Ambon	328806	178084	232448	256887	-45.84	30.53	10.51
35	Kendari	173040	211881	227190	251725	22.45	7.23	10.80
36	Pematang Siantar	238518	246739	229158	234416	3.45	-7.13	2.29
37	Probolinggo	198839	193816	203368	221916	-2.53	4.93	9.12
38	Banda Aceh	239751	220593	177744	219336	-7.99	-19.42	23.40
39	Jayapura	202320	170158	201752	214991	-15.90	18.57	6.56
40	Tarakan	-	125988	157818	175038	-	25.26	10.91
41	Gorontalo	138886	137650	156390	160360	-0.89	13.61	2.54
42	Pangkal Pinang	140374	127942	154876	154830	-8.86	21.05	-0.03
43	Tebing Tinggi	138180	126570	135252	139428	-8.40	6.86	3.09
44	Sibolga	81312	83991	89692	90618	3.29	6.79	1.03
Total Populasi		91879774	95228724	100228370	102544507	3.64	5.25	2.31

Sumber: World Bank 2012

Penyebaran penduduk miskin di Indonesia terfokus pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Hasil penelitian Carey dan Ravenstein pada abad ke-19 (dikutip dari Robinson Tarigan, 2008), tentang asal tempat tinggal migran yang datang ke berbagai kota besar di Amerika, menunjukkan bahwa jumlah migran yang masuk ke suatu kota dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk kota yang didatangi, besarnya jumlah penduduk tempat asal migran, dan jarak antar kota asal dengan kota yang dituju. Hal ini menunjukkan, wilayah perkotaan mempunyai gaya gravitasi untuk menarik mobilisasi penduduk daerah sekitar yang mempunyai pembangunan lebih rendah.

Urbanisasi penduduk miskin lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan populasi penduduk kota itu sendiri, hal ini merefleksikan terjadi perlambatan dalam upaya penurunan kemiskinan di perkotaan (Ravallion, Chen, and Sangraula, 2007). Tabel 2 menunjukkan, pada tahun 2008 hingga 2011, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin baik itu di kawasan desa maupun kota, dari angka 12.768.500 jiwa di kota pada tahun 2008, menjadi 11.046.750 jiwa. Hal yang senada juga terjadi di desa, pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin adalah 22.194.800 jiwa dan turun pada tahun 2011 menjadi 18.972.200 jiwa. Walaupun secara riil, angka kemiskinan di kedua daerah tersebut mengalami penurunan, tetapi terdapat perbedaan dalam persentase perubahan penurunan penduduk

miskin. Perubahan angka kemiskinan di pedesaan cenderung lebih cepat, pada tahun 2011 angka kemiskinan berkurang sebesar 5,03%. Sementara itu perubahan angka kemiskinan di perkotaan pada tahun yang sama (2011), hanya mengalami penurunan sebesar 0,46% dari tahun sebelumnya, dan rata-rata perubahan tiap tahunnya wilayah kota lebih kecil dibandingkan pedesaan dengan besaran 5,29 persen menunjukkan rigiditas kemiskinan perkotaan.

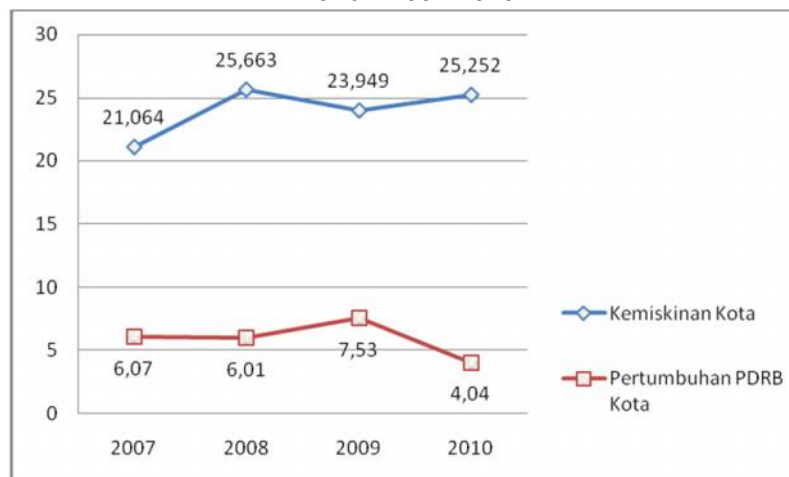
Tabel 2
Jumlah Penduduk Miskin, Perubahan Penduduk Miskin, dan Persentase
Perubahan Penduduk Miskin Kota dan Desa di Indonesia Tahun 2007-2011

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Perubahan Penduduk		Persentase Perubahan	
				Miskin (000)		Penduduk Miskin	
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	Kota	Desa
2008	12768,5	22194,8	34963,3	790,8	1414,2	6,19	6,37
2009	11910,5	20619,4	32529,9	858	1575,4	7,20	7,64
2010	11097,8	19925,6	31023,4	812,7	693,8	7,32	3,48
2011	11046,75	18972,2	30018,93	51,05	953,42	0,46	5,03
Rata-rata Perubahan Tiap Tahun						5,29	5,63

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut Boediono (dalam Kuncoro, 1997), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupan (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja serta terjadi pada wilayah-wilayah basis kemiskinan baik perkotaan maupun pedesaan sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan lebih berdampak nyata dalam pengurangan angka kemiskinan.

Gambar 1
Laju Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
dan Kemiskinan di 44 Kota Indonesia
Tahun 2007-2010



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1 menunjukkan komparasi antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di 44 kota Indonesia, kedua grafik tersebut mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang periode 2007-2010. Pada tahun 2010 ketika persentase pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,04%, persentase tingkat kemiskinan pada tahun 2010 mengalami peningkatan, dari 23,949 pada 2009 menjadi 25,252. Pada tahun 2009 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 25,663 pada tahun 2008 menjadi 23,949. Persentase pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada tahun 2009, dari 6,01% di 2008 menjadi 7,53%. Pada tahun 2008, persentase tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi hanya 6,01% dari tahun 2007 sebesar 6,07%, persentase jumlah kemiskinan juga mengalami kenaikan di tahun 2008, menjadi 25,663 dari tahun 2007 yang besarnya 21,064. Kecenderungan yang ditunjukkan dalam grafik 1, ketika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi (kenaikan angka PDRB) maka akan terjadi penurunan jumlah kemiskinan pada tahun yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu didukung oleh kestabilan kondisi makroekonomi dalam efektifitas upaya mengurangi jumlah angka kemiskinan. Inflasi merupakan salah satu variabel dalam makroekonomi dan peristiwa moneter yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Boediono (1982), inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Rendahnya pendapatan dan tingginya harga mengimplikasikan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi penduduk miskin. Hal tersebut seakan menegaskan pendapat bahwa inflasi merupakan pajak atas orang miskin, karena orang miskin mengalokasikan sebagian besar dari penghasilan mereka (atau hasil produksi, jika mereka menjadi pekerja di sektor pertanian atau sektor informal di perkotaan) untuk bertahan hidup (Agenor, 2005).

Menurut Dumairy (1996), perbandingan besar pengeluaran per kapita penduduk perkotaan terhadap penduduk pedesaan cenderung konstan tahun demi tahun. Pengeluaran orang kota hampir selalu dua kali lipat pengeluaran orang desa. Sehingga penduduk miskin di kota merasakan tingkat inflasi yang lebih besar dari pada pedesaan, karena jumlah pengeluaran yang lebih besar. Dengan demikian tingkat inflasi juga akan memberikan tekanan yang besar terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan.

Penurunan angka pengangguran terbuka³ di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2010, serta fluktuasi angka pengangguran terbuka di 44 kota. Terlihat pada tahun 2007 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 10.011.142 jiwa menjadi hanya 8.319.779 jiwa di tahun 2010. Akan tetapi, persentase pengangguran terbuka 44 kota terhadap jumlah pengangguran terbuka di Indonesia naik, pada tahun 2007 sebesar 17,28 persen, menjadi 22,45 persen pada tahun 2010. Walaupun jumlah angkatan kerja terus meningkat dari tahun ketahun, angka pengangguran menurun tiap tahunnya yang berarti bahwa sejumlah besar angkatan kerja telah mendapatkan pekerjaan, tetapi terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka di 44 kota yang laju pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan pengangguran terbuka seluruh Indonesia.

Hasil kajian *World Bank; Employment and Income Distribution in Indonesia, 1980* (dalam Sukanto dan Karseno, 1985) menunjukkan perbandingan angka pengangguran kota dan desa di Indonesia. terlihat proporsi angka pengangguran di kota meningkat lebih pesat dibanding wilayah desa. Dalam perkembangannya, angka pengangguran di perkotaan relatif serupa, mengingat tingkat urbanisasi pada tahun 1980an hingga 1990an terus meningkat tanpa disertai ketersediaan lapangan kerja yang memadai di perkotaan.

³ Pengangguran Terbuka: mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum dimulai.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Jumlah kemiskinan di perkotaan menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah kota, dimana terdapat rigiditas perubahan angka kemiskinan dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang lebih cepat dalam penurunan kemiskinan. Di sisi lain, kekakuan perubahan angka kemiskinan perkotaan didorong oleh angka perpindahan penduduk yang juga disertai perpindahan angka kemiskinan ke dalam kota (Sambhodo, dkk, 2011). Kemiskinan dapat tumbuh lebih cepat di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan karena krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan, seperti konstruksi, perdagangan, dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan.

Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan Perkotaan

Peningkatan angka Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat pada suatu periode tertentu. Tambahan pendapatan dari aktifitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika mampu menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan miskin. Semakin banyak golongan miskin yang memperoleh manfaat dari peningkatan angka PDRB maka tingkat kesejahteraan semakin meningkat dan terlepas dari kemiskinan. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, yang dapat dilihat melalui jumlah output (PDRB) yang dihasilkan oleh suatu daerah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H₁: Jumlah PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan perkotaan.

Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Kemiskinan Perkotaan

Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Kondisi menganggur mengakibatkan seseorang tidak dapat memiliki pendapatan, sehingga kesejahteraan yang telah dicapai akan makin merosot. Semakin turnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan. Elizabeth T. Powers (1995), menganalisis kondisi makroekonomi terhadap angka kemiskinan, dimana pengangguran (tingkat produktifitas pekerja pria). Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud, sehingga apabila dalam kondisi tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sadono Sukirno, 2004). Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H₁: Jumlah Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan perkotaan.

Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Kemiskinan Perkotaan

Dampak inflasi yang nyata ialah meningkatnya harga-harga kebutuhan hidup. Dengan kondisi pendapatan yang relatif minim dan tetap, adanya inflasi yang tidak terkendali akan mengakibatkan makin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan seseorang untuk masuk dalam kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani (2001) menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H₁: Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan perkotaan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Kemiskinan dalam penelitian ini mengacu pada jumlah penduduk miskin, yang dimaksud dengan jumlah penduduk miskin ialah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Secara umum PDRB diartikan sebagai keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini ialah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 selama tahun 2007 hingga 2010 di 44 kota seluruh Indonesia. Satuan yang digunakan ialah PDRB dalam milyar rupiah.

Pengangguran yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah jumlah pengangguran terbuka. Data yang digunakan ialah jumlah pengangguran terbuka di 44 kota pada tahun 2007 hingga 2010. Pada beberapa daerah angka pengangguran diperoleh melalui data tenaga kerja yang mendaftar atau mencari pekerjaan melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Satuan yang dipergunakan ialah jumlah jiwa. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Data inflasi yang dipergunakan merupakan inflasi yoy (*year on year*) dari bulan desember tahun t hingga bulan desember tahun $t-1$. Dalam penghitungan inflasi digunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencakup harga konsumen antara 284 hingga 441 barang dan jasa. Penggunaan data inflasi dalam penelitian ini dari inflasi yang terjadi di masing-masing kota dalam kurun waktu 2007-2010 dalam satuan persen.

Estimasi model panel dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*, yaitu *dummy* wilayah yang meliputi 44 kota di Indonesia. Penggunaan 44 kota tersebut mengacu pada penelitian World Bank “*The Rise of Metropolitan Regions: Towards Inclusive and Sustainable Regional Development*”. Pengklasifikasian 44 kota tersebut berdasarkan ukuran (*size*) atau populasi kota dengan menggunakan data Susenas 1996 hingga 2007. Jakarta dijadikan wilayah acuan (*benchmark*) bagi wilayah kota yang lain, hal ini dikarenakan Jakarta mempunyai jumlah penduduk miskin terbesar selama periode penelitian. Penggunaan *dummy* wilayah dalam penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan perbedaan yang terjadi antar wilayah dalam empat tahun. Dalam penelitian ini digunakan 43 *dummy* wilayah.

Metode Analisis

Analisis deskriptif kuantitatif, digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji, dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel, dan sebagainya) yang dideskripsikan secara lebih jelas. Tahap analisis kuantitatif terdiri dari: estimasi model regresi menggunakan data panel, regresi persamaan linier berganda dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) setelah melalui uji Hausman, uji statistik (uji R^2 , uji t atau parsial, serta uji F), dan uji asumsi klasik.

$$\begin{aligned} K_{it} = & \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 P_{it} + \beta_3 I_{it} + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \delta_3 D_3 \\ & + \delta_4 D_4 + \delta_5 D_5 + \delta_6 D_6 + \delta_7 D_7 + \delta_8 D_8 + \delta_9 D_9 \\ & + \delta_{10} D_{10} + \delta_{11} D_{11} + \delta_{12} D_{12} + \delta_{13} D_{13} + \delta_{14} D_{14} \\ & + \delta_{15} D_{15} + \delta_{16} D_{16} + \delta_{17} D_{17} + \delta_{18} D_{18} + \delta_{19} D_{19} \\ & + \delta_{20} D_{20} + \delta_{21} D_{21} + \delta_{22} D_{22} + \delta_{23} D_{23} + \delta_{24} D_{24} \\ & + \delta_{25} D_{25} + \delta_{26} D_{27} + \delta_{28} D_{28} + \delta_{29} D_{29} + \delta_{30} D_{30} \\ & + \delta_{31} D_{31} + \delta_{32} D_{32} + \delta_{33} D_{33} + \delta_{34} D_{34} + \delta_{35} D_{35} \\ & + \delta_{36} D_{36} + \delta_{37} D_{37} + \delta_{38} D_{38} + \delta_{39} D_{39} \\ & + \delta_{40} D_{40} + \delta_{41} D_{41} + \delta_{42} D_{42} + \delta_{43} D_{43} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Dimana:

- K = jumlah kemiskinan di 44 kota
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto di 44 kota
P = jumlah pengangguran di 44 kota
I = tingkat inflasi di 44 kota
 $D_1 - D_{43}$ = *dummy* wilayah
 β_0 = intersep
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi variabel bebas
 $\delta_1 - \delta_{43}$ = koefisien *dummy* wilayah
 ε_{it} = komponen *error* di waktu t untuk unit *cross section* i
 i = 1, 2, 3, ..., 43 (data *cross section* kota di Indonesia)
 t = 1, 2, 3, 4 (data *time series*, tahun 2007-2010)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Pada tahun 2008 jumlah total kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan yang terbesar menjadi 2566, dari yang mulanya 2106 pada tahun 2007. Sedikit banyak kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penghematan anggaran fiskal tahun 2008, dimana terjadi kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan membengkaknya angka subsidi bagi bahan bakar minyak. Dengan opsi menaikkan harga bahan bakar minyak secara langsung akan berdampak bagi kegiatan ekonomi, dan pada gilirannya mengurangi sejumlah pendapatan pelaku ekonomi sehingga angka kemiskinan mengalami peningkatan. Wilayah dengan rata-rata pertumbuhan penduduk miskin tertinggi ialah kota Jambi dengan rata-rata tiap tahunnya 0,442 persen. Peningkatan jumlah kemiskinan terbesar di kota Jambi terjadi pada tahun 2008, dari 23,2 ribu pada tahun 2007 menjadi 54,9 ribu. Kedua, peningkatan angka kemiskinan terbesar terjadi di kota Bengkulu, dengan rata-rata tiap tahunnya 0,361 dimana peningkatan jumlah kemiskinan terbesar juga terjadi pada tahun 2008, dari 25,7 ribu di tahun 2007 menjadi 52,2 ribu pada tahun 2008. Selanjutnya, perkembangan kemiskinan yang tertinggi juga terjadi di kota Kupang, peningkatan terbesarnya juga terjadi pada tahun 2008, dari 20,3 ribu pada tahun 2007 mejadi 46,1 ribu pada tahun 2008. Ketiga kota tersebut merupakan kota dengan populasi 0,1 hingga 0,5 juta jiwa atau sering disebut *small urban*.

Terjadi peningkatan angka PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlah PDRB ke 44 kota berjumlah 651653 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 781368. Peningkatan angka PDRB terbesar terjadi di kota Jayapura dengan rata-rata peningkatan 0,157 tiap tahunnya, dari angka 2187 pada tahun 2007 menjadi 3370 pada tahun 2010. Peningkatan yang tinggi juga terjadi di kota Pekanbaru Riau, dengan rata-rata peningkatan 0,118 tiap tahunnya, pada tahun 2007 jumlahnya 6997 dan pada tahun 2010 menjadi 9770. Hal yang serupa juga terjadi di kota Kendari, dengan rata-rata peningkatan lebih besar dari kota lain yakni 0,107. Dari 1478 pada tahun 2007 menjadi 2002 pada tahun 2010. Ketiganya merupakan kota dengan jumlah populasi yang rendah atau *small urban*.

Dilihat dari perkembangan tiap tahunnya, beberapa kota memperlihatkan tren penurunan pengangguran. Seperti di kota Probolinggo Jawa Timur, rata-rata perkembangan angka pengangguran menunjukan angka yang negatif yakni -0,254, berarti tiap tahunnya angka pengangguran rata-rata berkurang sebesar 0,254 persen. Akan tetapi, terdapat juga

kota yang menunjukkan tren perkembangan positif dalam angka penganggurannya, semisal kota Balikpapan, dimana nilai rata-rata perkembangannya sebesar 0,318, artinya tiap tahunnya terjadi penambahan jumlah pengangguran rata-rata 0,318 persen dari tahun sebelumnya. Tren penurunan dan peningkatan jumlah pengangguran ini mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah (desentralisasi fiskal) yang diambil dalam rangka peningkatan lapangan kerja.

Perkembangan inflasi dari tahun ke tahun yang fluktuatif, pada tahun 2008 secara rata-rata inflasi yang terjadi di 44 kota mengalami kenaikan yang tinggi, dari 7,05 pada tahun 2007 menjadi 11,42 pada tahun 2008. Hal ini terjadi tidak terlepas dari naiknya harga bahan bakar minyak pada tahun 2008 yang menyebabkan harga distribusi dan proses produksi berbahan bakar minyak mengalami kenaikan biaya yang berimbas pada naiknya harga barang produksi. Penurunan inflasi terjadi pada tahun 2009 menjadi hanya 6,23 hal ini terjadi senada dengan turunnya harga bahan bakar minyak secara bertahap pada akhir 2008 hingga awal 2009. Dilihat dari rata-rata perkembangannya pada tiap kota, terdapat beberapa kota yang mengalami rata-rata inflasi sebesar dua digit. Kota Tarakan dengan rata-rata inflasi 10,44, Kota Tebing Tinggi 10,26, Kota Mataram dan Kupang dengan rata-rata inflasi 10,18.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil regresi utama, diperoleh hasil bahwa koefisien dari produk domestik regional bruto (PDRB) ialah negatif dan signifikan secara statistik, artinya yaitu bahwa ketika terjadi kenaikan dalam produk domestik regional bruto (PDRB), maka akan menyebabkan penurunan jumlah kemiskinan. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007) juga sesuai dengan penelitian Wongdesmiwati (2009) yang menggunakan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi. Hipotesis penelitian bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan dapat diterima, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan.

Hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah pengangguran memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di 44 kota Indonesia. Koefisien regresi dari pengangguran ialah positif dan signifikan secara statistik, artinya kenaikan jumlah pengangguran akan menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pengangguran akan memicu peningkatan jumlah kemiskinan. Hasil penelitian Dian Octaviani (2001) juga menunjukkan hal yang serupa, bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara kemiskinan dan jumlah pengangguran *ceteris paribus*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan sesuai dengan penelitian Elizabeth T. Powers (1995) yang menyimpulkan bahwa angka pengangguran berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat kemiskinan, hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

Dari hasil regresi, ditemukan bahwa tingkat inflasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah kemiskinan 44 kota di Indonesia dengan koefisien positif. hal ini berarti kenaikan tingkat inflasi akan menyebabkan kenaikan jumlah. Semakin tinggi tingkat inflasi, akan memicu meningkatnya jumlah kemiskinan. Tingkat inflasi akan mempengaruhi tingkat kemiskinan karena dengan adanya inflasi, kebutuhan pokok dan harga-harga lainnya akan ikut naik. Penelitian Dian Octaviani (2001) dengan menggunakan model Cutler Katz juga menunjukkan hal yang serupa, dimana terdapat hubungan positif signifikan antara kemiskinan dan inflasi, *ceteris paribus*. Hipotesis penelitian dapat diterima, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan.

Tabel 3
Hasil Regresi Utama
Pengaruh PDRB, Pengangguran, Inflasi, dan *Dummy* Wilayah Terhadap Jumlah
Kemiskinan 44 Kota di Indonesia Tahun 2007-2010

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
C	348.5598	3.172841*	0.0019*
PDRB	-0.001639	-4.012382*	0.0001*
P	0.000586	4.389698*	0.0000*
I	0.015161	3.729274*	0.0003*
D1 (Surabaya)	-167.6712	-1.984312*	0.0494*
D2 (Bandung)	-326.5576	-3.397565*	0.0009*
D3 (Yogyakarta)	-375.4009	-3.645998*	0.0004*
D4 (Cirebon)	-322.6203	-2.984907*	0.0034*
D5 (Semarang)	-309.8836	-3.048138*	0.0028*
D6 (Medan)	-151.9864	-1.485934	0.1398
D7 (Kediri)	-311.5431	-2.996568*	0.0033*
D8 (Pekalongan)	-335.2650	-3.072465*	0.0026*
D9 (Mataram)	-310.8666	-2.857970*	0.0050*
D10 (Surakarta)	-293.5334	-2.718553*	0.0075*
D11 (Makasar)	-314.0094	-3.041291*	0.0029*
D12 (B. Lampung)	-244.4181	-2.255412*	0.0258*
D13 (Padang)	-311.2920	-2.912558*	0.0042*
D14 (Tegal)	-340.9540	-3.125410*	0.0022*
D15 (Denpasar)	-349.6433	-3.222150*	0.0016*
D16 (Palembang)	-164.5484	-1.565126	0.1201
D17 (Tanjung Balai)	-334.1832	-3.049594*	0.0028*
D18 (Payakumbuh)	-345.0066	-3.138959*	0.0021*
D19 (Malang)	-311.1240	-2.958560*	0.0037*
D20 (Madiun)	-346.7708	-3.170417*	0.0019*
D21 (Pekanbaru)	-336.1507	-3.118021*	0.0023*
D22 (Banjarmasin)	-333.5787	-3.064420*	0.0027*
D23 (Manado)	-343.0612	-3.197461*	0.0018*
D24 (Samarinda)	-334.7006	-3.105642*	0.0023*
D25 (Pontianak)	-324.2924	-3.022149*	0.0030*
D26 (Balikpapan)	-341.4998	-3.200482*	0.0017*
D27 (Jambi)	-316.7578	-2.906945*	0.0043*
D28 (Pare-Pare)	-350.2084	-3.191148*	0.0018*
D29 (Sukabumi)	-339.1663	-3.123389*	0.0022*
D30 (Palu)	-330.5993	-3.036481*	0.0029*
D31 (Kupang)	-327.3932	-3.001741*	0.0032*
D32 (Bengkulu)	-316.0219	-2.899642*	0.0044*
D33 (Ambon)	-344.6560	-3.164053*	0.0020*
D34 (Kendari)	-338.4619	-3.101750*	0.0024*
D35 (P. Siantar)	-326.2635	-2.969417*	0.0036*
D36 (Probolinggo)	-314.8214	-2.878875*	0.0047*
D37 (B. Aceh)	-378.4045	-3.595829*	0.0005*
D38 (Jayapura)	-322.0652	-2.970008*	0.0036*
D39 (Tarakan)	-350.6854	-3.175278*	0.0019*
D40 (Gorontalo)	-348.5808	-3.174166*	0.0019*
D41 (Pangkal Pinang)	-350.2987	-3.189647*	0.0018*
D42 (Tebing Tinggi)	-337.0770	-3.071771*	0.0026*
D43 (Sibolga)	-342.9636	-3.126007*	0.0022*
Jumlah Observasi	176		
R ²	0.981298		
F-statistik	134.9260		
Prob. F-stat	0.000000		

* Signifikan dalam $\alpha = 5$ persen, nilai t_{tabel} ialah 1,9785

Dari hasil regresi diketahui bahwa selama empat tahun periode penelitian terdapat 41 variabel *dummy* wilayah yang signifikan dan dari ke 43 koefisien variabel *dummy* semuanya bertanda negatif. Artinya, perkembangan 41 kota yang dijadikan variabel *dummy* berbeda dengan perkembangan kemiskinan yang terjadi di Jakarta, tetapi hanya terdapat dua yang tidak signifikan yakni Kota Medan dan Kota Palembang yang dapat dikatakan perkembangan jumlah kemiskinannya sama seperti yang terjadi di Jakarta. Kesamaan kondisi ini mungkin disebabkan oleh kesamaan karakteristik kondisi kota dari segi perekonomiannya selama periode penelitian. Sementara itu 43 variabel *dummy* atau semua variabel *dummy* memiliki kondisi atau jumlah kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Jakarta. Perbedaan kondisi ini mungkin disebabkan karena tiap daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang lebih kecil, termasuk perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kemiskinannya seperti perbedaan angka PDRB, pengangguran, dan inflasi yang tidak sebesar yang ada di Jakarta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil model regresi pengaruh PDRB, pengangguran, inflasi, dan *dummy* wilayah terhadap kemiskinan di 44 kota Indonesia tahun 2007-2010, dapat disimpulkan: 1) Besarnya angka Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan, sehingga hendaknya kedepan selalu didorong upaya peningkatan angka PDRB sekaligus dengan menjalankan peran pemerintah dalam pemerataan pendapatan dan hasil-hasil ekonomi pada seluruh golongan masyarakat melalui proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan penduduk miskin. Kedepannya diperlukan penelitian yang membahas perkembangan PDRB di perkotaan dengan mengklasifikasikannya dalam berbagai sektor ekonomi, baik dari sektor industri hingga pertanian, ataupun dalam sektor formal dan informal. 2) Pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan. Dengan terus melaksanakan upaya penurunan angka pengangguran nantinya akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Melalui kebijakan peningkatan lapangan pekerjaan dengan memfasilitasi investor dalam mendirikan usaha ataupun melalui program kewirausahaan, dimana secara khusus mengembangkan sektor informal serta industri padat karya. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti daerah asal pengangguran, apakah merupakan penduduk asli perkotaan atau pendatang. Serta mengidentifikasi pengangguran perkotaan yang terdapat di sektor-sektor ekonomi baik itu formal maupun informal. 3) Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan. Pemerintah secara aktif terus berperan dalam pengendalian tingkat inflasi di perkotaan dimana sebagian besar kebutuhan hidup dipasok dari luar daerah. Pengawasan harga melalui operasi pasar, menjaga stabilitas kondisi makroekonomi regional, serta penciptaan persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha diharapkan mampu mengontrol laju inflasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi sumber inflasi yang terjadi di perkotaan dengan lebih spesifik.

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menganalisis beberapa variabel makroekonomi regional di 44 sampel kota Indonesia, sehingga hasil dari penelitian ini mungkin berbeda dengan obyek penelitian lain yang serupa. Penggunaan variabel penelitian juga terbatas pada variabel ekonomi yang ada di perkotaan (internal), tanpa memasukan variabel sosial ataupun variabel lain yang berasal di luar perkotaan (eksternal).

REFERENSI

- Agenor Richard. 2005. *The Macroeconomics of Poverty Recuction*. Manchester: Centre for Growth and Business Cycle Research, University of Manchester. Available <http://ssrn.com>.
- Badan Pusat Statistik. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010.
- Boediono. 1982. *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2*. Yogyakarta: BPFE.
- Dian Octaviani. 2001. *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*. Media Ekonomi Vol. 7 No.2 Agustus 2001.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Pendduk Miskin*, Available <http://deptan.go.id>.
- Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPPAMP YKPN: Yogyakarta.
- M. Ravallion, Shaohua Chen, dan Prem Sangraula. 2007. *New Evidence on the Urbanization of Global Poverty*. Development Research Group, World Bank. Available <http://worldbank.org>.
- Muh. M. Nasir, Saichudin dan Maulizar. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Eksekutif. Vol. 5No.4, Agustus 2008. Jakarta: Lipi.
- Powers, Elizabeth. 1995. *Inflation, Unemployment, and Poverty Revisited*. Federal Reserve Bank of Cleveland. Available <http://worldbank.org>.
- Sambodho, dkk. 2011. *Mengintegrasikan Aspek Spasial Kemiskinan ke dalam Perencanaan Spasial Perkotaan: Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan Perkotaan*. Available <http://smeru.or.id>.
- Sukanto R dan A.R. Kaseno. 1985. *Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarmidi T. Lepi. 1999. *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran*. Jakarta: Bank Indonesia.
- World Bank. 2012. *The Rise of Metropolitan Regions: Towards Inclusive and Sustainable Regional Development*. Avaialbe <http://worldbank.org>.